

KEBIJAKAN PERDANA MENTERI NARENDRA DAMODARDAS MODI DALAM PENANGANAN PEKERJA ANAK DI INDIA (2014-2023)

Ulfra Rezza Ramadhanti

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Email: ulfarezzaramadhanti@gmail.com

Bastian Yunariono

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Email: bastian.yunariono@upnyk.ac.id

Submitted: June 10th 2024 | Accepted: July 17th 2024

ABSTRAK

India menjadi salah satu negara dengan keberadaan pekerja anak tertinggi di dunia. Berbagai upaya penanganan telah dilakukan pemerintah India baik melalui pembentukan kebijakan maupun kerja sama dengan organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan United Nations Children Fund (UNICEF). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Narendra Damodardas Modi dalam penanganan pekerja anak di India pada tahun 2014 hingga 2023, melalui teori instrumen kebijakan dari Schneider dan Ingram (1990). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanganan pekerja anak pada era Narendra Modi memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pembentukan kebijakan untuk mengamandemen dua undang-undang yaitu Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 2015 maupun Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja Tahun 1986. Amandemen tersebut berfokus pada perlindungan hak-hak anak, penentuan usia minimum untuk bekerja dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran yang secara langsung berkaitan dengan penanganan pekerja anak. Pemerintah juga meratifikasi dua Konvensi ILO sebagai bentuk komitmen India dalam memerangi pekerja anak yaitu Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Tahun 1973 dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Tahun 1999.

Kata Kunci: Pekerja Anak, Kebijakan, Instrumen Kebijakan, India.

ABSTRACT

India is one of the countries with the highest presence of child labour in the world. Various efforts have been made by the Indian government both through policy

formation and cooperation with international organisations such as the International Labour Organization (ILO) and the United Nations Children Fund (UNICEF). This research aims to analyse Narendra Damodardas Modi's policy in handling child labour in India from 2014 to 2023, through the theory of policy instruments from Schneider and Ingram (1990). This research uses a qualitative method, with data collection techniques through desk research. The results showed that the policy of handling child labour in the Narendra Modi era showed better progress than the previous year. The establishment of policies to amend two laws, namely the Child Justice Act 2015 and the Child and Adolescent Labour Act 1986. The amendments focus on protecting children's rights, determining the minimum age for employment and sanctioning offenders directly related to child labour. The government also ratified two ILO Conventions as a form of India's commitment in combating child labour namely ILO Convention No. 138 on Minimum Age in 1973 and ILO Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour in 1999.

Keywords: *Child Labor, Policy, Policy Instruments, India.*

PENDAHULUAN

Pekerja anak (*Child Labour*) adalah istilah yang sering digunakan sebagai sinonim terhadap anak yang bekerja atau dipekerjakan. Adapun menurut *International Labour Organization* (ILO) bahwa pekerja anak merupakan anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral (ILO, 2020). Pada umumnya kemunculan pekerja anak didorong oleh kesulitan dalam perekonomian, pengaruh pergaulan, rendahnya pendidikan orangtua, dan kurangnya pengetahuan dalam lingkungan masyarakat mengenai hak-hak anak (Artini dkk., 2023: 47-48)

India sebagai salah satu negara yang memiliki pekerja anak cukup tinggi selain dari Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa. Sejak abad ke-3 SM, anak-anak di India sudah melakukan pekerjaan dalam bentuk perbudakan seperti pada rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Arthashastra karya Kautilya. Bahkan kelompok umur yang banyak bekerja pada saat itu didominasi oleh anak-anak dengan umur dibawah 8 tahun (Singh, 2018: 18457).

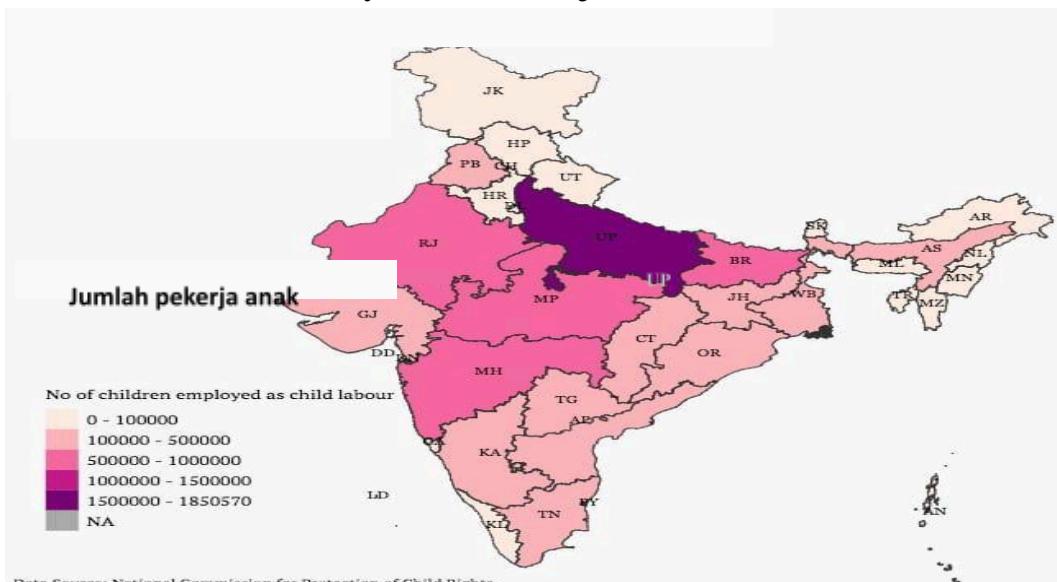
Pada abad pertengahan, anak-anak ditempatkan pada pelatihan bimbingan pembuatan kerajinan seperti tenun karpet, kapas, dan sutra yang mana tradisi ini berlanjut hingga membuka akses lapangan pekerjaan untuk anak-anak. Pada abad ke-18 dalam revolusi industri di Inggris, Hal ini mendorong banyaknya anak yang diangkat oleh pemilik pabrik untuk bekerja dan bertambahnya permintaan pekerja anak pada sektor pertanian akibat migrasi kaum pria dewasa ke kota industri.

Kelompok petani juga mulai melibatkan anak-anaknya sejak usia dini untuk belajar dan berpartisipasi dalam berbagai peran kerja hingga secara bertahap membuat konstruksi. Pada daerah pedesaan India juga terjadi peningkatan pekerja anak, karena sebagian masyarakat sangat bergantung pada pertanian sebagai satu-satunya sumber mata pencarian. Hal ini dikarenakan para petani mencari pinjaman dengan suku bunga

yang tinggi dari tuan tanah, namun tidak sedikit yang gagal membayar kembali pinjamannya sehingga anak-anak harus turut terlibat dalam melunasi hutang keluarganya (*Ibid*).

Pada tahun 1996, PBB mengeluarkan laporan bahwa India mempunyai setidaknya 50 juta anak yang terlibat dalam pekerjaan buruh (Elbaz, 2019). Kemudian pada awal tahun 2000, *Human Rights Watch* sebagai organisasi hak asasi manusia nirbala meluncurkan laporan terdapat 15 juta anak menjadi pekerja terikat. Pekerja anak terikat adalah anak-anak yang bekerja dengan bayaran kecil untuk tujuan melunasi hutang akibat dari pinjaman orang tua maupun wali anak tersebut. Banyak anak-anak yang bekerja selama 16 jam per hari dan ada juga yang bekerja sehari penuh sepanjang tahun (*Ibid*).

Gambar 1. Penyebaran Pekerja Anak di India Tahun 2011



Sumber: National Commission for Protection of Protection of Child Rights, 2011

Berdasarkan gambar 1, beberapa wilayah di India yang menjadi pusat dari total setengah populasi penyebaran pekerja anak yakni Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh dan Maharashtra. Dalam menanggapi permasalahan terkait pekerja anak pemerintah India telah mengupayakan sejumlah kebijakan maupun bekerja sama dengan organisasi internasional seperti *International Labour Organization* (ILO) dan *United Nations Children Fund* (UNICEF). Kebijakan tersebut diantaranya Undang-Undang Pabrik 1948, Undang-Undang Pertambangan tahun 1952, Undang-Undang Pekerja Anak (Larangan dan Regulasi) tahun 1986, meluncurkan program *The International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) tahun 1992 bersama ILO, program pendidikan untuk perempuan melalui *Mahila*

Samakhya; education for women's equality tahun 1989, dan berbagai program lainnya.

Meskipun belum memberikan hasil yang maksimal untuk menghilangkan keberadaan pekerja anak di India. Namun berbagai kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pekerja anak selalu menjadi perhatian Pemerintah India dalam setiap masa pemerintahan. Hal yang sama juga dilakukan pada masa pemerintahan perdana menteri Narendra Damodardas Modi.

Narendra Damodardas Modi terpilih sebagai perdana menteri ke-14 India yang memulai masa jabatannya pada 26 Mei 2014. Bahkan tidak berhenti pada satu periode, Narendra Damodardas Modi kembali terpilih sebagai Perdana Menteri India pada pemilu Lok Sabha 2019 yang kemudian memulai jabatannya kembali pada 30 Mei 2019. Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri India telah banyak kebijakan maupun skema yang dilakukan Modi khususnya mengenai permasalahan anak-anak India seperti keberadaan pekerja anak. Pada masa pemerintahannya, beliau membentuk reformasi ambisius terhadap isu pekerja anak India melalui pembentukan Rancangan Undang-undang (RUU) Amandemen Pekerja Anak tahun 2016 yang telah disetujui pada 29 Juli 2016 oleh Parlemen India (Economic Times Bureau, 2017).

Amandemen tersebut menuai banyak kritikan dikarenakan mengandung pembahasan di mana anak berusia 14 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan apabila bermaksud untuk membantu keluarga atau bisnis keluarga (The Hindu, 2016). Para aktivis berpendapat terdapat kesulitan dalam menentukan apakah bisnis keluarga benar-benar dijalankan langsung oleh suatu keluarga ataukah dikelola oleh pemilik lain namun mempekerjakan satu keluarga untuk menghindari hukum. Banyak persepsi bahwa keluarga dapat menawarkan lingkungan kerja yang terjamin keamanannya, namun penyumbang total pekerja anak untuk kelompok umur anak-anak 5 hingga 11 tahun berasal dari lingkungan keluarga khususnya pada bidang pertanian dan industri (Qamar, 2021). Shamshad Khan, Presiden Pusat Aksi Pendidikan dan Pembangunan Pedesaan mengatakan RUU Amandemen sebagai langkah "retrogresif" di mana semua kampanye untuk mengakhiri pekerja anak menjadi tidak bermakna bahkan akan meningkatkan angka buta huruf (Walia, 2015).

Dalam perkembangannya, RUU Amandemen tersebut tetap dilaksanakan mulai 1 September 2016 yang kini dikenal dengan Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja (Larangan dan Peraturan) 1986. Adapun hasil dari penanganan pekerja anak di India memperlihatkan adanya perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015, satu tahun pemerintahan Narendra Modi, *International Labour Organization* (ILO) menemukan sebanyak 5,7 juta anak menjadi pekerja anak (Khan & Lyon, 2015: 81). Angka ini kemudian menurun pada tahun 2017, pertama kalinya India mencapai angka terendah terhadap persentase jumlah pekerja anak di India (Bureau of International Labor Affairs, 2017: 1).

Pendiri *Global March Against Child Labour*, Kailash Satyarthi pada Mei 2022, menyampaikan upaya India di bawah pemerintahan Narendra Damodardas Modi dalam memerangi pekerja anak telah mencapai kinerja yang jauh lebih baik

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti adanya undang-undang mengenai pekerja anak yang mana penegakan hukum selalu menjadi tantangan yang sulit, namun kini India mempunyai hukum yang baik (The Hindu, 2022b).

Perkembangan dinamika dalam penanganan pekerja anak pada era perdana menteri Narendra Damodardas Modi menarik untuk ditelusuri. Di mana meskipun upaya beliau dalam menerapkan amandemen undang-undang pekerja anak mendapatkan kritikan dari para aktivis, namun kondisi pekerja anak di India pada masa pemerintahan beliau dikatakan cenderung lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisa kebijakan penanganan pekerja anak pada era perdana menteri Narendra Damodardas Modi selama dua periode dari tahun 2014 hingga 2023.

KERANGKA BERPIKIR

Istilah kebijakan senantiasa dihubungkan dengan aturan dalam berperilaku untuk menciptakan kepatuhan pada suatu lingkungan. Anne Schneider dan Helen Ingram (1993) memberikan gambaran bahwa suatu kebijakan setidaknya berisikan pesan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, warga negara mana yang berhak dan mana yang tidak, dan sikap serta pola partisipatif seperti apa yang pantas dalam masyarakat demokratis (Schneider & Ingram, 1993: 334). Adapun kebijakan publik menurut Schneider dan Ingram merupakan kebijakan yang berupaya mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok pada suatu lingkungan masyarakat dalam merespon kebijakan (Schneider & Ingram, 1990: 513).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dibentuk dan dilaksanakan oleh seorang maupun sekumpulan aktor dalam menyelesaikan suatu permasalahan serta mempengaruhi sejumlah besar orang. Sedangkan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh seorang maupun sekumpulan aktor dalam mengatasi masalah dalam kehidupan masyarakat sekaligus mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam merespon kebijakan.

Adapun terdapat suatu analisa dalam studi kebijakan yang berfokus pada pemeriksaan substansi dari suatu kebijakan yang mana dikenal sebagai penerapan instrumen kebijakan (Capano & Howlett, 2020: 2). Instrumen atau alat kebijakan adalah teknik pemerintah untuk membantu dalam menentukan dan mencapai tujuan (Bali dkk., 2021: 295). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pemilihan instrumen kebijakan yang tepat dan sesuai dalam mempermudah pelaksanaan sekaligus mencapai tujuan suatu kebijakan.

Anne Schneider dan Helen Ingram (1990) mengembangkan teori instrumen kebijakan dengan menghubungkan antara perilaku partisipasi kebijakan dengan penerapan instrumen kebijakan yang diantaranya yaitu: *authority tools* (alat otoritas), *incentive tools* (alat intensif), *capacity tools* (alat kapasitas), *symbolic and hortatory tools* (alat simbolik dan *hortatory*), serta *learning tools* (alat pembelajaran) (Schneider & Ingram, 1990: 514-521). Schneider dan Ingram juga menambahkan bahwa akan

ditemukan adanya penerapan analisis komparatif terhadap berbagai jenis kebijakan khususnya mengenai hubungan antara instrumen kebijakan dengan partisipasi kebijakan oleh populasi sasaran (*Ibid*, 1990: 525)

Pertama, Schneider dan Ingram memandang otoritas sebagai salah satu teknik tertua dan paling umum yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan. Otoritas dalam hal ini sebagai kekuasaan sah yang digunakan dalam memandu perilaku masyarakat baik melalui pemberian perizinan, larangan, atau permintaan melakukan tindakan dalam kondisi tertentu. Kedua, Menurut Schneider dan Ingram insentif berasumsi bahwa individu tidak akan termotivasi untuk mematuhi kebijakan kecuali dipengaruhi dan dipaksa dengan adanya imbalan berupa uang, kebebasan, kehidupan, dan lain sebagainya. Schneider dan Ingram mengkategorikan alat intensif menjadi beberapa subtipe yakni *Inducements* (bujukan), *Charges* (biaya), *Sanctions* (sanksi), dan *Force* (pemaksaan) (Schneider & Ingram, 1990: 515).

Ketiga, instrumen kapasitas mengasumsikan bahwa masyarakat akan mempunyai motivasi dalam mematuhi kebijakan apabila mendapatkan cukup informasi yang memadai serta mempunyai sumber daya yang diperlukan. Sehingga melalui instrumen kapasitas, pemerintah berperan sebagai penyedia informasi, pelatihan, pendidikan, dan berbagai kapasitas lainnya dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengambil keputusan dan menjalankan aktivitas (Schneider & Ingram, 1990: 517). Keempat, simbolik dan *hortatory* menurut Schneider dan Ingram bahwa masyarakat termotivasi dan cenderung mematuhi perilaku yang diinginkan suatu kebijakan apabila kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Instrumen simbolis berupa pelabelan, melibatkan penggunaan gambar, simbol atau sejenisnya dan *hortatory* berupa kalimat ajakan melalui komunikasi persuasif yang keduanya bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap berbagai kegiatan yang terdapat dalam kebijakan melalui sektor publik maupun swasta tanpa adanya campur tangan insentif dari pemerintah.

Kelima, instrumen pembelajaran digunakan apabila tidak adanya pemahaman masyarakat dalam pengambilan tindakan (Schneider & Ingram, 1990: 521). Instrumen pembelajaran berasumsi bahwa pemerintah tingkat lokal maupun masyarakat dapat memahami perilaku serta memilih kebijakan yang paling efektif dari kebijakan yang lainnya.

Dalam menganalisa permasalahan pekerja anak di India, teori instrumen kebijakan Anne Schneider dan Helen Ingram (1990) dapat digunakan untuk menjelaskan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah India dalam menangani pekerja anak di India khususnya pada era Perdana Menteri Narendra Damodardas Modi (2014-2023). Untuk mempermudah analisa yang dilakukan, maka pada penelitian ini akan memfokuskan pada penggunaan dua unsur instrumen yaitu instrumen *authority tools* (alat otoritas) dan *incentive tools* (alat intensif).

Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan pemaparan berbagai kebijakan pada masa perdana menteri Narendra Damodardas Modi 2014 hingga 2023 dalam memerangi kasus pekerja anak di India. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai buku literatur bahkan berbagai liputan berita yang dimuat dalam setiap media elektronik maupun media massa yang berkaitan dan sesuai. Teknik analisa data yang digunakan adalah eksplanatif kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data untuk dianalisis secara komprehensif untuk mendapatkan pembahasan serta kesimpulan yang akurat. Penelitian ini mempunyai batasan penelitian dari tahun 2014 hingga 2023 berdasarkan masa pemerintahan Narendra Damodardas Modi yang berlangsung selama dua periode.

PEMBAHASAN

Kondisi Pekerja Anak Di India Pada Pemerintahan Narendra Damodardas Modi

Pada tahun 2014, Narendra Damodardas Modi terpilih menjadi perdana menteri India menggantikan Manmohan Singh yang sebelumnya menjabat selama dua periode di India sejak tahun 2004. Narendra Modi dikenal sebagai perdana menteri pro-pertumbuhan yang mana sejak pemerintahannya, India telah menerapkan reformasi dalam menderegulasi dan mengembangkan perekonomian India. Akan tetapi, bukan hanya pada lingkup perekonomian India. Penerapan reformasi juga dilaksanakan Narendra Modi dalam permasalahan pekerja anak di India.

Pada tahun 2014, Ketika Narendra Modi memulai masa pemerintahannya, masih banyak anak-anak di India yang terlibat dalam pekerjaan seperti pada bidang pertanian, manufaktur, dan berbagai kondisi pekerjaan lainnya. Permasalahan utama yang dihadapi pekerja anak India mengarah pada beberapa hal. Pertama, masih banyak orang tua yang melibatkan anak-anak untuk bekerja akibat dorongan kondisi ekonomi. Kedua, banyak anak yang ditemukan bekerja sebagai pekerja terikat maupun kerja ijon dengan waktu yang berlebihan setiap hari dan biaya upah yang murah. Ketiga, lemahnya penegakan hukum dan kepatuhan baik dari orang tua maupun kelompok pengusaha terhadap berbagai kebijakan pekerja anak di India. Keempat, banyak anak yang ditemukan terlantar tanpa orang tua maupun tempat tinggal sehingga mendorong mereka terjerumus pekerja anak.

Beberapa wilayah dengan penemuan pekerja anak pada bidang pertanian seperti pedesaan Andhra Pradesh banyak ditemukan anak-anak yang bekerja pada tempat produksi minyak biji kapas dengan waktu rata-rata 12 jam per hari. Anak-anak tersebut terpapar bahan kimia seperti pestisida namun tidak disediakan peralatan pelindung (R. Mehta et al., 2021: 6279).

Kelompok pekerja anak juga ditemukan pada bidang manufaktur seperti pada industri garmen, pekerja anak di India mempunyai kesamaan dengan perbudakan pada zaman modern. Anak-anak dengan usia dibawah 14 tahun ditempatkan pada bagian

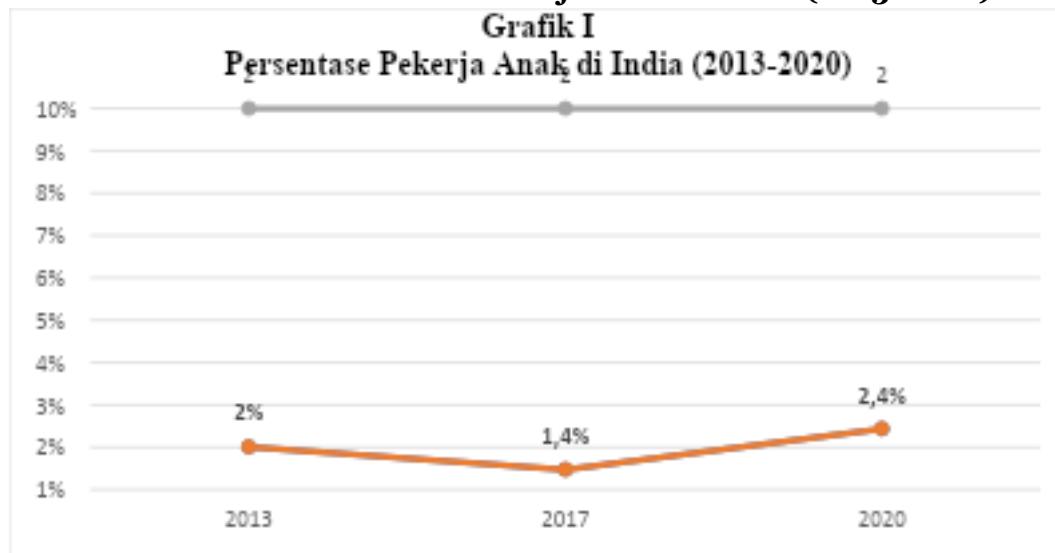
pemintalan, penenunan, serta bagian potong memotong atau bordir. Pemilik industri garmen mempekerjakan anak-anak tersebut disebabkan kegiatan bordir dan menambah detail pakaian meningkatkan biaya karena diperlukan penggunaan mesin sehingga melalui bantuan anak-anak dengan menggunakan jari-jari kecil mereka maka pekerjaan dapat selesai dengan cepat dan biaya pekerjaan jauh lebih murah (Gulati, 2021: 275).

Bukan hanya pertanian dan manufaktur, pada lingkup pertambangan juga ditemukan anak-anak dipaksa bekerja sebagai buruh ijlon untuk melunasi utang keluarga mereka. Bahkan banyak anak-anak yang berasal dari pedesaan melakukan migrasi untuk mendapatkan pekerjaan di bidang industri seperti pembuatan karpet, produk biji kapas, dan sebagainya di mana mereka harus bekerja pada lingkungan berbahaya dengan upah yang rendah.

Pada tahun 2014, tercatat lebih dari 4 juta anak dengan usia 5 hingga 14 tahun bekerja lebih dari 6 jam sehari dan sekitar 2 juta anak dengan usia yang sama bekerja 3 hingga 6 bulan dalam setahun. Selain itu, ditemukan sebanyak 56,4% anak-anak usia 5 hingga 14 tahun yang bekerja pada bidang pertanian dan 33,1% yang bekerja pada bidang industri (Radfar dkk., 2018: 18).

Penemuan pekerja anak dalam berbagai bidang pekerjaan tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah India dalam meminimalisir pekerja anak selama ini belum cukup untuk meminimalisir penyebaran kasus pekerja anak di India. Namun, untuk mempermudah pemantauan sejauh mana perkembangan pekerja anak di India pasca 2013, maka diperlukan pengelolaan data pekerja anak di India sebagaimana terdapat pada grafik I berikut.

Grafik 1. Persentase Pekerja Anak di India (2013-2020)



Sumber: Department of Labor. (2013). Bureau Of International Labor Affairs (2017). Das, K. S. (2022).

Berdasarkan data yang disampaikan pada grafik I tersebut, dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan pekerja anak di India dari tahun 2013 hingga 2020 memang terlihat kenaikan namun kenaikan tersebut tidak begitu tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, terdapat 4,371 anak dengan umur 5 hingga 14 tahun yang menjadi pekerja anak. Pada tahun 2017, terdapat 1,4% atau 3,253 juta anak usia 5 hingga 14 tahun yang menjadi pekerja anak. Angka ini menjadi angka yang terendah yang pernah dicapai oleh India. Pada tahun 2020, ditemukan sekitar 2,4% atau 7,430 juta anak dengan umur 5 hingga 17 tahun yang menjadi pekerja anak (Das, 2022: 3).

Beberapa faktor pendorong pekerja anak diantaranya kondisi orang tua atau pencari nafkah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga anak-anak akan turut terlibat membantu orang tua bekerja untuk menambah penghasilan pribadi maupun keluarga. Bahkan anak-anak juga menjadi tenaga kerja imigran pada wilayah lain (Kim & Olsen, 2023: 192). Beberapa negara bagian khususnya pada wilayah India bagian tengah dan timur menjadi lokasi di mana masyarakat miskin selalu melakukan migrasi setiap bulannya. Curah hujan yang tidak menentu mengakibatkan hasil pertanian hanya didapat sekali dalam setahun serta kurangnya lapangan pekerjaan untuk para pekerja. Hubungan kasta yang masih melekat, penyelenggaraan pemerintahan yang belum berjalan dengan baik sehingga kurangnya akses masyarakat miskin terhadap skema dan manfaat yang seharusnya di nikmati, bahkan banyak sekolah negeri yang kurang berfungsi akibat tingkat kehadiran yang sedikit semakin menekan masyarakat miskin untuk melakukan migrasi untuk memenuhi kebutuhan mereka (Ellis, 2019: 103).

Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai serta kesulitan menjangkau sekolah juga mendorong anak-anak yang terperangkap dalam pekerja anak di India (Kim & Olsen, 2023: 191). Bahkan tahun 2019, pandemi Covid-19 memaksa anak-anak untuk putus sekolah dikarenakan banyaknya sekolah yang resmi ditutup. Banyak anak-anak yang diarahkan untuk bekerja dalam bidang pertanian maupun pabrik sehingga kembali menambah permasalahan pekerja anak di India (Ghosh & Mahara, 2020: 6).

Adapun dampak yang dialami pekerja anak mengarah pada pendidikan dan masalah Kesehatan. Kesulitan mengakses pendidikan baik dari biaya hingga sarana prasarana lainnya tentunya berdampak pada kebutuhan pendidikan anak yang tidak dapat terpenuhi dengan sepenuhnya, sehingga tidak sedikit anak-anak menguburkan mimpi mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka. Ditambah lagi kehadiran pandemi Covid-19 yang semakin menyulitkan akses masyarakat ke bawah dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Bahkan dampak kesehatan pada pekerja anak seperti sakit punggung, cedera (seperti luka bakar maupun cedera mesin), bahkan stres dan depresi. Adapun penemuan banyak anak yang hilang bahkan diperdagangkan untuk menjadi bagian dari kerja paksa dan ijon, eksloitasi seksual komersial dan berbagai pekerjaan illegal lainnya. Hal ini berarti anak-anak juga mengalami kerentanan terhadap tindakan eksloitasi dalam dunia pekerjaan.

Berbagai perusahaan Barat seperti Gap juga mendapatkan kecaman karena adanya eksplorasi terhadap anak-anak India yang dianggap menyalahgunakan berbagai anak terkait pekerjaan gratis dalam proses manufaktur oleh perusahaan tersebut (Ramachandran, 2020). Berdasarkan data kejahatan pemerintah India pada tahun 2018, di mana tercatat sebanyak 2.400 kasus perdagangan manusia dan hampir setengah dari korban tersebut berumur di bawah 18 tahun (Sisca, 2020).

Semakin berkembangnya kasus pekerja anak di India ditambah dengan dampak dari Covid-19 yang melanda India mendorong pemerintah India harus menggunakan berbagai cara selain peraturan untuk memastikan seluruh bagian masyarakat mendapatkan pemahaman sekaligus mengimplementasikan penegakan hak-hak anak dengan komprehensif.

Berbagai aspek tersebut mendorong anak-anak di India berada dalam dilema atas pilihan keputusannya untuk turut serta bekerja atau tidak, sehingga fenomena pekerja anak terhadap anak-anak di India cenderung sulit untuk dihilangkan dan kebutuhan akan keadilan terhadap anak-anak yang dihadapkan dengan kekerasan tersebut masih menjadi hal yang senantiasa di upayakan hingga saat ini. Oleh karena itu, perincian mengenai instrumen kebijakan pada era perdana menteri Narendra Damodardas Modi dalam menangani pekerja anak perlu diperjelas untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat India serta hambatan lainnya yang menjadikan kebijakan pemerintah India hingga saat ini belum mampu memerangi pekerja anak di India. Sehingga pembahasan berikutnya akan menjelaskan implementasi instrumen kebijakan penanganan pekerja anak pada era perdana menteri Narendra Damodardas Modi.

Kebijakan Narendra Modi Dalam Menangani Pekerja Anak Melalui Instrumen *Authority Tools*

Instrumen otoritas merupakan instrumen kebijakan tertua yang digunakan untuk memandu perilaku pejabat dan masyarakat. *Authority Tools* atau alat otoritas sebagaimana yang dimaksudkan oleh Anne Schneider dan Helen Ingram (1990) yakni pemerintah melalui kekuasaannya membentuk serangkaian kebijakan meliputi perijinan maupun larangan yang kemudian harus dipatuhi oleh masyarakat. Dalam menangani pekerja anak di India, instrumen otoritas juga diterapkan pada pemerintahan Narendra Damodardas Modi. Hal ini dapat dilihat melalui Amandemen Undang-Undang dan meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO).

1. Amandemen Undang-Undang Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) 2015.

Amandemen ini disahkan Parlemen India ditengah perdebatan panjang dan protes jalanan antara anggota parlemen dengan kelompok yang menyuarakan hak-hak anak (Pradhan, 2020). Pelaksanaan amandemen tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali yakni pada tahun 2015 dan dilakukan kembali pada tahun 2021.

Tujuan Amandemen Undang-Undang Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) tahun 2015 adalah memastikan perlindungan, kesejahteraan, dan rehabilitasi terhadap anak yang disertai dengan pembentukan Dewan Peradilan Anak (Deshmukh, 2024). Khususnya usia 18 tahun kebawah yang terlibat dalam permasalahan hukum atau pelanggaran maupun anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan. Anak-anak tersebut diamanatkan untuk diarahkan pada *Child Welfare Committee* (CWC) atau Komite Kesejahteraan Anak (Department of Labor, 2015).

Amandemen ini disahkan pada 31 Desember 2015 kemudian mulai berlaku pada 15 Januari 2016 (Indiacode.nic.in, 2015). Pada 15 Maret 2021 Rancangan Undang-Undang Amandemen Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) 2021 kembali diperkenalkan pada Lok Sabha. Pada 28 Juli 2021 rancangan tersebut disahkan oleh Rajya Sabha. Tujuan utama amandemen kedua tersebut untuk mengatasi serta menghilangkan berbagai kesulitan pada berbagai ketentuan dalam penerapan Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 2015 (Press Information Bureau Delhi, 2021).

Beberapa perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Anak (Pengasuhan dan Perlindungan Anak) diantaranya:

- Mengubah penyebutan “anak dibawah umur” menjadi “anak yang berhadapan dengan hukum” dan “anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan”.
- Penambahan istilah baru seperti anak yatim piatu dan anak yang terlantar.
- Pengelompokan terhadap jenis pelanggaran yang dilakukan anak-anak dan remaja menjadi tiga yakni pelanggaran kecil (seperti mengemudi tidak berhati-hati, penipuan, perampokan, dan lain sebagainya), pelanggaran serius atau berat (seperti kekerasan, pemerasan, penculikan dan berbagai tindakan serius lainnya), dan pelanggaran keji (seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan berbagai tindakan kriminal lainnya).
- Untuk kategori pelanggaran keji akan diperjelas menjadi pelanggaran berat dengan menambahkan pengaturan bahwa pelanggaran berat akan mencangkup hukuman minimal kurang dari 7 tahun dan maksimal lebih dari 7 tahun penjara. Semua pelanggaran tersebut akan diadili oleh Pengadilan Anak. Namun, terdapat beberapa pelanggaran dengan hukuman penjara antara 3 hingga 7 tahun yang ditetapkan ‘tidak dapat diketahui’ yang artinya tidak dapat melakukan penangkapan apabila tidak ada surat perintah penangkapan.
- Memperjelas wewenang, fungsi, dan tanggung jawab *Juvenile Justice Board* (JJB) atau Dewan Peradilan Anak dan *Child Welfare Committee* (CWC) atau Komite Kesejahteraan Anak. Mengamanatkan pembentukan kedua lembaga tersebut pada setiap distrik dengan anggota perempuan minimal satu orang.
- Mewajibkan lembaga penitipan anak untuk mendaftar pada pemerintah pusat dalam waktu 6 bulan sejak tanggal berlakunya undang-undang.

Meskipun tidak menyebutkan secara khusus mengenai pekerja anak, namun pada Bab I bagian kedua mengenai defensi, pasal 14 (II) menyebutkan bahwa anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan salah satunya merupakan anak yang ditemukan bekerja sebagai pengemis, hidup dijalanan, bahkan terlibat dalam pekerjaan yang bertentangan dengan undang-undang perburuhan yang masih berlaku. Selain itu, pada Bab IX mengenai Pelanggaran Lain Terhadap Anak-Anak disebutkan beberapa tindakan yang melarang adanya pekerjaan terhadap anak seperti mengemis hingga menggunakan anak-anak untuk menjual, membawa, dan menyelundupkan minuman keras maupun obat-obat terlarang.

Dalam implementasinya, amandemen tahun 2015 mengamanatkan keterlibatan beberapa lembaga seperti *Juvenile Justice Board* (JJB) atau Dewan Peradilan Anak dan *Child Welfare Committee* (CWC) atau Komite Kesejahteraan Anak. Berbagai lembaga tersebut harus dibentuk pada setiap distrik di seluruh wilayah negara bagian India. Ketika ditemukan kasus anak yang melanggar hukum, maka hal ini akan ditindaklanjuti oleh Dewan Peradilan Anak melalui penyelidikan. Apabila kemudian anak tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka Dewan Peradilan Anak akan mengarahkan anak tersebut pada Komite Kesejahteraan Anak untuk diberikan perawatan dan perlindungan hukum.

Adapun pemerintah negara bagian juga berperan dalam memantau pelaksanaan tugas dari berbagai lembaga tersebut. Pemerintah negara bagian harus menerima laporan mengenai peninjauan terhadap penangguhan kasus yang ditemukan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak tahun 2015. Laporan tersebut merupakan laporan triwulan Komite Kesejahteraan Anak yang kemudian ditinjau kembali oleh Hakim Distrik untuk diberikan kepada pemerintah negara bagian. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelahnya laporan yang diberikan masih sama, maka pemerintah negara bagian akan memberhentikan komite yang ada dan membentuk komite baru.

Khusus mengenai istilah pelanggaran “tidak dapat diketahui” atau harus mendapatkan surat perintah pengadilan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan, dalam hal ini diantaranya kekejaman pada anak oleh staf *Child Care Institutions* (CCIs) atau Lembaga Penitipan Anak, mempekerjakan anak untuk mengemis, memberikan minuman keras atau sejenisnya kepada anak, eksplorasi pekerja anak, penjualan anak, dan penggunaan anak oleh kelompok militer (Sharma, 2022). Istilah pelanggaran tersebut dipandang memberatkan golongan masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum India. Bahkan hakim Mahkama Agung dan Ketua Eksekutif Otoritas Pelayanan Hukum Nasional, Uday Umesh Lalit, menekankan perlunya pemberian layanan berkualitas disertai dengan bantuan hukum gratis. Hal ini juga dilihat dari menurunnya kasus peradilan anak yang sampai pada Badan Pelayanan Hukum (Live Law News Network, 2022).

Dalam perkembangannya, pada tahun 2018, ditemukan dari 34 negara bagian dan 680 distrik India terjadi peningkatan sebanyak 643 distrik yang membentuk Dewan Peradilan Anak dan 645 distrik yang membentuk Komite Kesejahteraan Anak

(NCPCR India, 2022). Namun pada tahun yang sama sebanyak 629 kasus perintah adopsi masih dalam status menunggu keputusan dari pengadilan. Pasca perubahan kedua, pada tahun 2022 kebijakan ini berhasil mengeluarkan sebanyak 2.297 perintah adopsi yang tetunda di seluruh India (Anu Meena Care Foundation, 2023). Berbagai perkembangan tersebut memperlihatkan Undang-Undang Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) menjadi salah satu instrumen otoritas yang digunakan dalam mencapai tujuan kebijakan penanganan pekerja anak di India.

Berbagai perkembangan tersebut memperlihatkan Undang-Undang Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) menjadi salah satu instrumen otoritas yang digunakan dalam mencapai tujuan kebijakan penanganan pekerja anak di India. Meskipun telah melalui amandemen sebanyak dua kali, namun melalui kebijakan tersebut terdapat tiga ketentuan yang menjadi perhatian yaitu: *Pertama*, pembentukan lembaga Dewan Peradilan Anak dan Komite Kesejahteraan Anak yang berperan dalam mengadili dan melindungi anak-anak dari berbagai kejahatan pada setiap distrik. Meskipun masih terdapat beberapa distrik yang belum membentuk dua lembaga tersebut, namun sejauh ini jumlah lembaga yang terbentuk mulai meningkat secara signifikan.

Kedua, pemerintah India membentuk pengaturan tersendiri mengenai adopsi terhadap anak yatim piatu dan anak terlantar. *Ketiga*, penambahan istilah pelanggaran “tidak dapat diketahui” yang hanya dapat ditangani apabila ada surat perintah pengadilan. Dari tiga ketentuan tersebut, ketentuan ketiga menjadi kekhawatiran terhadap lemahnya kekuatan undang-undang ini. Dengan demikian, penggunaan instrumen otoritas melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) India dirasa belum sepenuhnya kuat dalam menangani permasalahan kasus pekerja anak di India.

2. Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja (Larangan dan Peraturan) 1986.

Penggunaan instrumen otoritas juga diterapkan melalui pembentukan Amandemen Undang-Undang Larangan dan Peraturan Pekerja Anak pada tahun 2016. Amandemen tersebut sebelumnya diusulkan pada Desember 2012 untuk milarang usia dibawah 14 tahun bekerja namun usulan tersebut mengalami penolakan. Pada pemerintahan Narendra Modi tepatnya pada tahun 2015, dilakukan revisi kembali oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan sebelum akhirnya mendapatkan persetujuan Kabinet.

Pada 19 Juli 2016, revisi tersebut disetujui oleh Rajya Sabha yang kemudian diikuti persetujuan dari Lok Sabha pada 26 Juli 2016 (PRS Legislative Research, 2024). Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja (Larangan dan Peraturan) tahun 2016 kemudian disahkan pada 29 Juli 2016 dan mulai diberlakukan pada 1 September 2016. Tujuan amandemen undang-undang pekerja anak adalah membentuk usia minimum nasional untuk bekerja sesuai standar internasional sekaligus membangun semangat kewirausahaan anak-anak.

Adapun beberapa perubahan pada Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja (Larangan dan Peraturan) tahun 2016 tersebut, diantaranya:

- Pemisahan istilah anak-anak dan remaja. Untuk kelompok anak-anak merupakan mereka yang berusia dibawah 14 tahun sedangkan kelompok remaja merupakan mereka yang berada pada kisaran 14 hingga 18 tahun.
- Mengurangi kelompok pekerjaan berbahaya dari 83 menjadi 3 pekerjaan yang digolongkan berbahaya diantaranya pertambangan, bahan mudah terbakar dan proses pekerjaan berbahaya yang disebutkan dalam Undang-Undang Pabrik.
- Larangan dalam mempekerjakan anak-anak berlaku secara menyeluruh dengan pengecualian terhadap dua kondisi berikut:
 - a. Anak-anak diperbolehkan ‘membantu’ pekerjaan orang tua atau usaha keluarganya dengan catatan tidak terlibat dalam proses pekerjaan yang berbahaya dan hanya dapat dilakukan setelah jam sekolah atau selama liburan.
 - b. Anak-anak diperbolehkan terlibat dalam bisnis audio visual kecuali sirkus seperti iklan, film atau kegiatan hiburan dan olahraga lainnya. Dengan syarat harus mematuhi kondisi pekerjaan yang ditentukan dan mengutamakan keselamatan serta tidak mengganggu pendidikan anak-anak dan remaja.
- Pemerintah negara bagian dapat memberikan wewenang pada Hakim Distrik untuk memastikan pelaksanaan ketentuan undang-undang dilaksanakan dengan semestinya.
- Pemerintah negara bagian mendapatkan wewenang dalam melakukan pemeriksaan berkala terhadap berbagai tempat yang melarang mempekerjakan anak-anak dan remaja.

Dalam perkembangannya, keberadaan amandemen tersebut mendapatkan banyak kritikan khususnya dari kalangan aktivis yang memperjuangkan pekerja anak. Kritikan tersebut mengarah pada dua perubahan yang disampaikan yakni memperbolehkan anak-anak untuk bekerja pada usaha keluarga dan memangkas kategori pekerjaan berbahaya dari 83 menjadi 3 pekerjaan. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan *Right to Education Act 2009* atau Undang-Undang Hak Atas Pendidikan tahun 2009 dan implementasi dari konvensi *International Labour Organization* (ILO).

Kekhawatiran pada anak-anak yang melakukan pekerjaan setelah jam sekolah atau pada saat liburan akan mengurangi efektivitas mereka dalam mengerjakan tugas sekolah serta menyita waktu belajar mereka. Bahkan hal ini akan menjadi lebih buruk untuk anak-anak yang kemampuan membaca dan berhitung memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Selain itu, masih banyak pekerjaan lainnya yang tidak terlalu bahaya untuk pekerja dewasa namun tergolong berbahaya untuk anak-anak namun tidak dicantumkan (*Ibid*).

Menghadapi berbagai kritikan tersebut, amandemen ini tetap dilaksanakan. Dalam implementasinya, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah India mengeluarkan Peraturan Amandemen Pekerja Anak dan Remaja (Larangan dan

Peraturan) pada 2 Juni 2017 untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab pemerintah negara bagian serta otoritas distrik untuk memastikan penegakan hukum yang efektif (Press Information Bureau Delhi, 2020). Pemerintah juga menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) atau Prosedur Operasional Standar sebagai protokol yang siap dipakai untuk para praktisi kebijakan, pelatih, dan berbagai lembaga penegakkan maupun pemantauan lainnya (*Ibid*). Bahkan tercatat sebanyak 11 dari 28 negara bagian di India telah mengeluarkan rencana aksi tersebut yaitu Andhra Pradesh, Delhi, Gujarat, Jharkhand, Bihar, Karnataka, Meghalaya, Punjab, Odisha, Tamil Nadu, dan Uttar Pradesh.

Meskipun menghadapi berbagai permasalahan, pemerintah India tetap menjalankan amandemen tersebut dengan tiga alasan yakni: *pertama*, Pemerintah India hanya ingin anak-anak belajar berwirausaha melalui pekerjaan yang ringan, di mana banyak orang tua yang memiliki usaha kerajinan, toko atau kedai, dan industri ringan lainnya dapat memberikan pelatihan kepada anak-anak secara dini. Tentunya kegiatan tersebut juga seharusnya dilakukan setelah menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan. Anak-anak nantinya juga dapat memilih apakah ingin melanjutkan usaha keluarga tersebut atau ingin melanjutkan cita-citanya.

Kedua, hukuman yang diberikan pemerintah bukan hanya diberikan untuk pelaku pemberi kerja terhadap anak-anak namun juga pada orang tua yang melibatkan anak-anak dalam pekerjaan yang berlebihan atau berbahaya. Sehingga pemerintah juga sudah mengantisipasi adanya kondisi berlebihan yang dialami anak-anak ketika terlibat dalam bisnis keluarga. *Ketiga*, pemerintah juga membuat peraturan tambahan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) atau Prosedur Operasional Standar yang mana hal ini untuk membangun koordinasi bersama pemerintah negara bagian dengan pihak penegakan hukum lainnya.

Perkembangan kondisi tersebut memperlihatkan ketegasan pemerintah untuk tetap menjalankan Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja Tahun 2016 sekaligus membuat peraturan tambahan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) atau Prosedur Operasional Standar. Hal ini untuk membangun koordinasi bersama pemerintah negara bagian dengan pihak penegakan hukum lainnya. Selain itu, untuk mencapai hasil yang maksimal maka diperlukan kerjasama antara pemerintah maupun masyarakat secara menyeluruh.

3. Meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 138 dan Nomor 182.

Pemerintah Narendra Modi juga menggunakan instrumen otoritas dengan meratifikasi dua Konvensi International Labour Organization (ILO). Kedua konvensi tersebut yakni Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Tahun 1973 dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Tahun 1999. Kedua konvensi tersebut diratifikasi oleh India pada 13 Juni 2017. Penyerahan instrumen ratifikasi tersebut dilaksanakan pada Konferensi Perburuhan

Internasional ke-106 yang berlangsung di Jenewa, dan diserahkan kepada Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder (ILO, 2017d).

Direktur Jenderal ILO memuji keputusan India dalam meratifikasi kedua konvensi tersebut sebagai langkah bersejarah di mana India telah menyampaikan pesan yang kuat untuk tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk pekerja anak. Selain itu, hal ini pun akan menambah kapasitas Konvensi ILO No 182 yang akan meliputi 99% anak-anak di dunia dan Konvensi ILO No 138 yang akan berkembang menjadi 80% anak-anak di dunia (*Ibid*). India kemudian menjadi negara ke-170 yang meratifikasi Konvensi ILO No 138 dan negara ke-181 yang meratifikasi Konvensi No 182. Tujuan utama pemerintah India meratifikasi kedua konvensi tersebut adalah menegaskan kembali komitmen negara terhadap masyarakat bebas pekerja anak (ILO, 2017e).

Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum sendiri dibentuk pada Juni 1973 dalam sidang ILO ke-58 yang dikenal sebagai salah satu konvensi dasar hak asasi manusia (ILO, 2017b). Konvensi ini terdiri atas 18 Pasal, dengan beberapa garis besar diantaranya:

- Menetapkan usia minimum yang tidak boleh kurang dari usia tamat wajib belajar dan tidak kurang dari 15 tahun. Hal ini dikecualikan untuk negara dengan ekonomi dan pendidikan kurang berkembang, maka dapat menetapkan usia minimal 14 tahun dengan catatan telah berkonsultasi dengan berbagai organisasi pengusaha dan pekerja terkait.
- Usia minimum untuk pekerjaan berbahaya tidak boleh kurang dari 18 tahun, namun dalam kondisi tersebut pemberian izin mempekerjakan anak diperbolehkan hanya untuk minimal 16 tahun dengan catatan terdapat syarat perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan dan moral remaja. Selain itu, remaja tersebut telah menerima pelatihan khusus atau kejuruan yang memadai. Meskipun demikian, seluruh hal tersebut dapat dilakukan pasca berkonsultasi dengan berbagai organisasi pengusaha dan pekerja terkait.
- Konvensi ini tidak berlaku terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja pada sekolah umum, pendidikan ke jurusan atau lembaga pelatihan lainnya.
- Undang-undang atau peraturan nasional dapat mempekerjakan usia 13 hingga 15 tahun dengan syarat tidak membahayakan kesehatan atau perkembangannya dan tidak mengurangi kehadiran di sekolah.

Dalam implementasinya, Konvensi ILO No 138 berhubungan dengan Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja tahun 2016. Undang-undang tersebut sebagai bentuk kebijakan nasional India dalam upaya menghapus pekerja anak yang menetapkan umur anak-anak yakni 14 tahun kebawah serta melarang sepenuhnya terlibat untuk bekerja kecuali ‘membantu’ orang tua dalam pekerjaan ringan setelah waktu sekolah. Sehingga, hal ini menegaskan bahwa Pemerintah India juga mengutamakan kepentingan pendidikan anak-anak India dengan memenuhi hak

dan kewajiban anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Sehingga ketentuan Konvensi ILO No 138 telah dilaksanakan dengan sesuai oleh pemerintah India.

Umur 14 tahun juga merupakan umur tamat wajib belajar di India sesuai dengan Undang-Undang Hak Anak atas Pendidikan Gratis dan Wajib Tahun 2009. Selain substansi tersebut, India juga membuat istilah remaja yang diperbolehkan untuk bekerja namun tidak pada pekerjaan berbahaya. Pekerjaan berbahaya yang dimaksud diantaranya pertambangan, bahan mudah terbakar atau meledak, dan proses berbahaya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pabrik tahun 1948.

Apabila dilihat pada urutan ke-3 dari garis besar Konvensi ILO No 138, toleransi umur minimal yang dibatasi untuk pekerjaan berbahaya adalah 18 tahun dan khusus untuk negara kurang berkembang adalah 16 tahun dengan memastikan keamanan dan keselamatan. Sedangkan pada urutan ke-6 dari garis besar Konvensi ILO No 138, disampaikan bahwa undang-undang atau peraturan nasional dapat memperbolehkan umur 13 hingga 15 tahun bekerja namun mengutamakan keselamatan dan tidak mengganggu waktu kehadiran di sekolah. Dengan demikian, batasan umur 14 hingga 18 tahun yang diijinkan bekerja oleh pemerintah India dalam Amandemen Undang-Undang Pekerja anak dan Remaja tahun 2016 telah sesuai dan mematuhi Konvensi ILO No 138.

Adapun konvensi kedua yakni Konvensi ILO No. 182 mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Konvensi ini diadopsi pada sidang ILO ke-87 yang diadakan di Jenewa pada 1999 (ILO, 2017c). Konvensi ini terdiri atas 16 Pasal, dengan beberapa ketentuan pokok diantaranya yakni:

- Istilah anak pada konvensi ini merujuk pada semua anak yang berusia di bawah 18 tahun, dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai berikut:
 - a) Segala bentuk perbudakan atau praktik serupa seperti perdagangan anak, kerja ijon, hingga kerja paksa atau wajib seperti perekrutan anak secara paksa atau wajib dalam kelompok bersenjata.
 - b) Penggunaan pengadaan atau penawaran anak dalam hal prostitusi, produksi pornografi, maupun pertunjukan pornografi.
 - c) Penggunaan, pengadaan atau penawaran anak dalam kegiatan terlarang khususnya produksi dan perdagangan narkoba sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional yang relevan.
 - d) Pekerjaan yang memiliki sifat dan kondisi membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak-anak.
- Berbagai jenis pekerjaan tersebut akan ditentukan melalui undang-undang atau peraturan nasional oleh pihak yang berwenang. Kemudian setiap negara anggota wajib membentuk mekanisme dan program aksi yang tepat dalam memantau maupun memprioritaskan pelaksanaan berbagai ketentuan yang memberlakukan konferensi ini.

Dalam implementasinya, Konvensi ILO No. 182 ini juga disebut sebagai Konvensi Hak Asasi Manusia yang mendasar. Konvensi ini mempunyai kaitan dengan

Amandemen Undang-Undang Peradilan Anak dan Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja. Pada Undang-Undang Peradilan Anak pemerintah India menegaskan bahwa anak-anak yang terlibatkan dalam kegiatan terlarang seperti produksi dan perdagangan narkoba maupun merekrut anak-anak dalam kelompok bersenjata akan mendapatkan perlindungan. Selain itu, pada Undang-Undang Pekerja Anak juga menegaskan bahwa berbagai tindakan lainnya yang sangat dilarang seperti praktik perbudakan, kerja paksa, maupun berbagai bentuk pekerjaan yang memiliki sifat dan kondisi membahayakan fisik maupun mental anak-anak.

Bahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap implementasi terkait bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pemerintah India juga membentuk *Standard Operating Procedure (SOP)* atau Prosedur Operasional Standar sebagai protokol pelaksanaan yang ditujukan pada berbagai pihak yang terlibat dalam menegakkan Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja. Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi substansi Konvensi ILO No. 182 mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak telah sesuai dijalankan oleh pemerintah India sebagaimana melalui kedua undang-undang yang dibentuk.

Langkah pemerintah dalam meratifikasi kedua Konvensi ILO memperlihatkan pemerintahan Narendra Modi menyadari bahwa permasalahan pekerja anak merupakan hal mendesak mengingat permasalahan ini tidak kunjung berakhir sejak lama serta hal ini berkaitan dengan hak anak-anak India. Dengan demikian, keputusan untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan Konvensi ILO No. 182 telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah India sebagaimana diimplementasikan melalui Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Pekerja Anak.

Kebijakan Narendra Damodardas Modi Dalam Menangani Pekerja Melalui Instrumen *Incentive Tools*

Incentive Tools atau alat insentif digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah apabila instrumen otoritas dirasa kurang memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan kebijakan. Insentif menurut Anne Schneider dan Helen Ingram (1990) diklasifikasikan menjadi beberapa empat yaitu *Inducements* (bujukan), *Charges* (biaya), *Sanctions* (sanksi) dan *Force* (pemaksaan).

Pada masa kepemimpinan Narendra Modi, penggunaan instrumen intensif terlihat melalui penetapan *Sanctions* (sanksi) dalam Amandemen Undang-Undang Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) Tahun 2015 dan Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja (Larangan dan Peraturan) Tahun 1986. Sanksi dalam hal ini meliputi denda dan hukuman penjara.

1. Sanksi Amandemen Undang-Undang Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak).

Penetapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) Tahun 2015 diantaranya:

- Larangan pengungkapan identitas anak (memberitahukan nama, alamat, sekolah, gambar anak atau hal khusus lainnya) dalam berbagai bentuk komunikasi lainnya kecuali terdapat catatan perijinan tertulis oleh dewan atau komite. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dihukum dengan penjara maksimal 6 bulan atau denda 2 lakh rupee atau keduanya.
- Hukuman terhadap tindakan kekerasan pada anak dibagi menjadi dua yakni: *pertama*, apabila tindakan kekerasan dilakukan oleh orang yang bekerja atau mengelola lembaga penampungan anak, maka akan diberikan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 lakh Rupee. *Kedua*, apabila kekejaman yang dilakukan menyebabkan anak cacat fisik, menderita penyakit mental, bahkan memiliki resiko terhadap nyawa, maka pelaku akan dihukum dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda sebanyak 5 lakh rupee.
- Tindakan mempekerjakan anak untuk mengemis akan dihukum dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda 1 lakh rupee. Namun, apabila untuk tujuan mengemis pelaku mengamputasi atau membuat cacat anak tersebut, maka akan dihukum penjara minimal 7 tahun dan maksimal 10 tahun dengan denda 5 lakh rupee.
- Tindakan memberikan minuman keras atau sejenisnya kepada anak baik untuk dikonsumsi (kecuali atas perintah praktisi medis) maupun dijual maka akan dihukum maksimal 7 tahun penjara dan denda maksimal 1 lakh rupee.
- Eksploitasi pekerja anak (mempekerjakan, memperbudak untuk tujuan pekerjaan, dan menahan penghasilan atau menggunakan penghasilan untuk kepentingan pelaku) maka akan dihukum dengan penjara maksimal 5 tahun dan denda 1 lakh rupee.
- Tindakan menjual atau membeli anak untuk tujuan apapun akan dihukum penjara maksimal 5 tahun dan denda 1 lakh rupee
- Pemanfaatan anak oleh kelompok militan akan dihukum dengan penjara maksimal 7 tahun dan denda sebesar 5 lakh Rupee.

Selain berbagai sanksi untuk pelaku pelanggaran terhadap anak, pemerintah juga membuat tiga sanksi terhadap anak-anak dan remaja yang melakukan pelanggaran melalui Undang-Undang Peradilan Anak diantaranya:

- Pelanggaran Kecil yang mencangkup pelanggaran dengan hukuman maksimum 3 tahun penjara.
- Pelanggaran Serius atau Berat yang mencangkup pelanggaran dengan hukuman minimum 3 tahun penjara dan maksimum 7 tahun penjara.
- Pelanggaran Keji yang mencangkup pelanggaran dengan hukuman minimum 7 tahun bahkan lebih.

Untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Peradilan Anak mendorong kepatuhan masyarakat India, maka diperlukan rekapitulasi data mengenai kasus sebagaimana dicantumkan melalui Tabel I berikut.

Tabel 1. Jumlah Kasus yang Terdaftar Berdasarkan Ketentuan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) Tahun 2015 (2014-2020)

Jumlah Kasus Berdasarkan Amandemen Perlindungan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) 2015							
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus	1.315	1.457	2.253	2.452	2.030	1.968	1.713

Sumber: Haq: Centre for Child Rights (HAQCRC) (2020) & Ministry of Home Affairs (2018).

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa sejak 2016, India mengalami peningkatan kasus. Hal ini kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019. Kenaikan jumlah kasus yang terdaftar sekilas memperlihatkan dua kemungkinan yaitu: *Pertama*, penegakan Undang-Undang Peradilan Anak oleh pemerintah India telah berjalan dengan baik. *Kedua*, kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Peradilan Anak yang masih belum sepenuhnya diimplementasikan oleh masyarakat. Keberadaan anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan maupun dukungan lingkungan yang baik seperti anak-anak yang terlantar dan pekerja anak dikhawatirkan dapat mendorong mereka melakukan tindakan melanggar peraturan.

Berdasarkan laporan dari *National Crime Records Bureau* (NCRB) atau Biro Catatan Kejahatan Nasional di India pada tahun 2021, tercatat sebanyak 31.170 kasus yang melibatkan anak. Bahkan dari keseluruhan kasus tersebut melibatkan 37.444 anak yang ditahan. Selain itu, diantara anak-anak yang ditahan terdapat 32.654 anak yang ditahan berdasarkan *The Indian Penal Code* (IPC) atau KUHP India dan 4.790 anak ditahan berdasarkan *Special and Local Laws* (SLL) atau Undang-Undang Khusus dan Setempat (Ruralindiaonline.org, 2022).

Setidaknya salah satu faktor yang memungkinkan lemahnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Peradilan Anak yaitu kurangnya informasi atau sosialisasi terhadap masyarakat maupun remaja mengenai Amandemen Undang-Undang Peradilan Anak. Hal ini juga berlaku untuk kelompok masyarakat tertentu pada wilayah yang sulit mendapatkan informasi termasuk mengenai adanya amandemen baru dari pemerintah.

2. Sanksi Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja (Larangan dan Peraturan) Tahun 1986.

Selain dari Undang-Undang Peradilan Anak, adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja diantaranya:

- Siapapun yang mempekerjakan atau membiarkan anak dan remaja bekerja pada pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan yang diberikan, akan

dihukum dengan pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun, atau denda minimal 20.000 Rupee dan maksimal 50.000 Rupee, atau dengan keduanya.

- Apabila pelaku pelanggaran yang telah dihukum kemudian melakukan pelanggaran yang sama, maka akan diberikan hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun. Apabila pelaku merupakan orang tua atau wali anak tersebut, maka akan diberikan hukuman denda sebanyak 10.000 Rupee.

Untuk melihat sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap sanksi yang diberikan, maka diperlukan adanya catatan jumlah kasus secara berkala sebagaimana dicantumkan pada Tabel II berikut.

Tabel 2. Jumlah Kasus yang Terdaftar Berdasarkan Ketentuan Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja (Larangan dan Peraturan) 1986 (2014-2020)

Jumlah Kasus Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja (Larangan dan Peraturan) 1986							
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus	147	251	204	462	464	772	476

Sumber: Haq: Centre for Child Rights (HAQCRC) (2020) & Ministry of Home Affairs (2018).

Berdasarkan Tabel 2, sejak 2017 jumlah kasus yang terdaftar berdasarkan Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, dari 464 kasus yang terdaftar berdasarkan Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja, ditemukan 810 anak-anak yang ditetapkan sebagai korban (Kaur & Byard, 2021). Meskipun demikian, terdapat empat wilayah dengan kasus tertinggi yang dilaporkan setiap tahunnya yakni Assam, Gujarat, Karnataka, Maharashtra dan Telangana.

Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan jumlah kasus sebelum dan sesudah Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja. Hal ini berhubungan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan amandemen undang-undang pekerja anak. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal lainnya seperti permasalahan perekonomian dalam keluarga, keberadaan berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab, hingga kurangnya pemahaman terhadap substansi dari amandemen undang-undang pekerjaan anak termasuk sanksi yang didapatkan. Untuk itu masih diperlukan adanya sosialisasi atau dukungan lainnya yang dapat mendukung implementasi Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja 1986.

Pada dasarnya penggunaan instrumen insentif dalam kebijakan merupakan bentuk dukungan terhadap instrumen otoritas yang digunakan sebelumnya.

Pemerintah India menyadari bahwa sanksi sangat diperlukan dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pekerja anak di India. Hal tersebut kemudian dilaksanakan melalui penetapan sanksi terhadap pelaku yang melanggar berbagai ketentuan yang terdapat dalam Amandemen Undang-Undang Peradilan Anak 2015 maupun Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja 1986.

KESIMPULAN

Penanganan pekerja anak pada masa Narendra Modi mengarah pada reformasi yang optimis dalam penanganan pekerja anak dengan mengubah dan melengkapi kebijakan lama. Pemerintahan Narendra Modi menggunakan *Authority Tools* (alat otoritas) melalui pembentukan Amandemen Undang-Undang Peradilan Anak (Perawatan dan Perlindungan Anak) Tahun 2015, Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja (Larangan dan Peraturan) Tahun 1986, dan meratifikasi dua Konvensi *International Labour Organization* (ILO) yaitu Nomor 138 Tahun 1973 dan Nomor 182 Tahun 1999. Penggunaan *Incentive Tools* (alat intensif) diterapkan melalui penetapan sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dari Amandemen Undang-Undang Peradilan Anak dan Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja.

Kedua instrumen tersebut juga saling melengkapi dan memberikan hasil yang efektif. Pemerintah mengupayakan pengelolaan implementasi kebijakan penanganan pekerja anak melalui kedua instrumen tersebut dengan melibatkan berbagai kementerian dan organisasi internasional.

Keseluruhan kebijakan penanganan pekerja anak pada era Perdana Menteri Narendra Damodardas Modi memperlihatkan adanya kemajuan dengan penggunaan instrumen kebijakan yang lebih kompleks serta penemuan jumlah kasus pekerja anak di India yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anu Meena Care Foundation. (2023). "Child Adoption in India: Challenges, Progress, and the Path Forward". <https://www.linkedin.com/pulse/child-adoption-india-challenges-progress-path-forward-anumeenacare>. Diunduh pada 17 April 2024.
- Artini, N. L. P. A., Daeng, A., & Agustiani, E. (2023). "Faktor-Faktor Penyebab Adanya Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Kota Mataram". *Oportunitas Ekonomi Pembangunan*. Vol.2, No.1, Maret 2023. Hal. 43-50.
- Bali, A. S., Howlett, M., Lewis, J. M., & Ramesh, M. (2021). "Procedural policy tools in theory and practice". *Policy and Society*. Vol.40, No.3, September 2021. Hal. 295–311.
- Bureau Of International Labor Affairs. (2017). "India SIGNIFICANT ADVANCEMENT – 1 2017 FINDINGS ON THE WORST FORMS OF CHILD LABOR". India, Government of India. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2017/india.pdf
- Capano, G., & Howlett, M. (2020). "The Knowns and Unknowns of Policy Instrument Analysis: Policy Tools and the Current Research Agenda on Policy Mixes". *SAGE Open*. Vol.10, No.1, Januari 2020. Hal. 1-13.
- Das, K. S. (2022). "Child labour and its determinants in India". *Children and Youth Services Review*. Vol.138, April 2022. Hal. 1-6.
- Department of Labor. (2015). "India Moderate Advancement". India, USDOL. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2015/india.pdf
- Deshmukh, H. P. (2024). "The Juvenile Justice (Care And Protection Of Children) Act, 2015 Overview". <https://www.legalserviceindia.com/legal/legal/article-14380-the-juvenile-justice-care-and-protection-of-children-act-2015-overview.html>. Diunduh pada 28 Maret 2024.
- Economic Times Bureau. (2017). "Child labour: India ratifies two child labour conventions - The Economic Times". <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/india-ratifies-two-child-labour-conventions/articleshow/59134572.cms>. Diunduh pada 19 Desember 2022.
- Elbaz, S. (2019). "Indian Child Labor Photograp". <https://www.encyclopedia.com/history/legal-and-political-magazines/indian-child-labor/>. Diunduh pada 7 Oktober 2023.
- Ellis, J. (2019). "Inspiration from abroad Migrant child labour in India's brick kilns". *Sociální pedagogika | Social Education*. Vol.7, No.2, November 2019. Hal. 103–105.
- Ghosh, S., & Mahara, P. (2020). "Policy Brief Covid 19 and Child Labour In India". New Delhi, Child Rights and You (CRY).

- <https://www.cry.org/wp-content/uploads/2020/12/policy-brief-covid-19-and-child-labour-in-india.pdf>
- Gulati, S. (2021). "Child Labour In The Indian Industrial Sector". *Quarterly Bi-Lingual Research Jaournal*. Vol.8, No.29, Maret 2021. Hal. 274–278.
- ILO. (2017a). "A landmark step - India ratifies ILO conventions on child labour". http://www.ilo.org/newdelhi/info/public/fs/WCMS_557730/lang--en/index.htm. Diunduh pada 28 Maret 2024
- ILO. (2017b). "Convention C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)". International Labour Organization. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
- ILO. (2017c). "Convention C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)". International Labour Organization. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
- ILO. (2017d). "India ratifies both fundamental ILO Conventions on Child Labour". http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_557295/lang--en/index.htm. Diunduh pada 28 Maret 2024.
- ILO. (2020). "What is child labour (IPEC)". <https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm#banner>. Diunduh pada 3 Februari 2024.
- indiacode.nic.in. (2015). "Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015". https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2148?sam_handle=123456789/1362. Diunduh pada 5 April 2024.
- Kaur, N., & Byard, R. W. (2021). "Prevalence and potential consequences of child labour in India and the possible impact of COVID-19 – a contemporary overview". *SAGE Journals*. Vol.61, No.3, Februari 2021. Hal. 208–214).
- Khan, S., & Lyon, S. (2015). *Measuring Children's Work in South Asia Perspectives from national household surveys*. New Delhi: International Labour Organization (ILO).
- Kim, J., & Olsen, W. (2023). "Harmful forms of child labour in India from a time-use perspective". *Development in Practice*. Vol.33, No.2, Februari 2023. Hal. 190–204.
- Live Law News Network. (2022). "Free Legal Aid Doesn't Mean Poor Legal Aid, Must Mean Quality Service : Justice UU Lalit". <https://www.livelaw.in/top-stories/free-legal-aid-doesnt-mean-poor-legal-aid-must-mean-quality-service-justice-uu-lalit-195096?infinitescroll=1>. Diunduh pada 28 Maret 2024.
- Mehta, R., Tyagi, A., Dua, S., & Khanijau, V. (2021). "Portentous Evaluation Of Child Labour: An Indian Perspective". *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*, Vol.12, No.9, Agustus 2021. Hal. 6276–6293.

- NCPCR India. (2022). "Annual Report - National Commission for Protection of Child Rights, India". India, Government of India. <https://ncpcr.gov.in/annual-report>
- Pradhan, R. (2020). "Critical Analysis: Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015". <https://lexforti.com/legal-news/juvenile-justice-act-2015/#Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015>. Diunduh pada 28 Maret 2024.
- Press Information Bureau Delhi. (2020). "Government Committed for Eradication of Child Labour". India, Ministry of Labour & Employment. <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1602640>
- Press Information Bureau Delhi. (2021). "Parliament Passes Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill 2021". India, Ministry of Labour & Employment. <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1740011>
- PRS Legislative Research. (2024). "The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012". <https://prsindia.org/billtrack/the-child-labour-prohibition-and-regulation-amendment-bill-2012>. Diunduh pada 28 Maret 2024.
- Qamar, M. (2021). "covid-19_meningkatnya pekerja anak india". <https://hindi.feminisminindia.com/2021/06/30/ilo-and-unicef-report-on-child-labour-hindi/>. Diunduh pada 21 Oktober 2024.
- Radfar, A., Asgharzadeh, S. A. A., Quesada, F., & Filip, I. (2018). "Challenges and Perspectives of Child Labor". *Industrial Psychiatry Journal*, Vol.27, No.1, Juni 2018. Hal 17–20.
- Ramachandran, A. (2020). "Child Labor in India – Humanium". <https://www.humanium.org/en/child-labor-in-india/>. Diunduh pada 19 Desember 2022.
- Ruralindiaonline.org. (2022). "Crime in India 2021: Volume-I". New Delhi, National Crime Records Bureau. <https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/crime-in-india-2021-volume-i/>
- Schneider, A., & Ingram, H. (1990). *Behavioral Assumptions of Policy Tools*. Chicago: The University of Chicago Press Journals.
- Schneider, A., & Ingram, H. (1993). *Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy*. Cambridge: Cambridge University Press. Diunduh pada 2 Februari 2024.
- Sharma, K. A. (2022). "Juvenile Justice Amendment Act 2021 – A Critical View". <https://www.i-probono.com/articles/juvenile-justice-amendment-act-2021-a-critical-view/>. Diunduh pada 28 Maret 2024.
- Singh, S. K. (2018). "CHILD LABOUR IN INDIA: A HISTORICAL PERSPECTIVE". <http://www.journalijdr.com>. Diunduh pada 13 Maret 2024.
- Sisca, S. P. (2020). "Pemerintah India Khawatir Perdagangan Anak Meningkat Setelah Lockdown Dilonggarkan Halaman all".

<https://www.kompas.com/global/read/2020/08/08/193959770/pemerintah-india-khawatir-perdagangan-anak-meningkat-setelah-lockdown?page=all>.

Diunduh pada 19 Desember 2022.

The Hindu. (2016). “A law that allows child labour”.
<https://www.thehindu.com/opinion/columns/Ruchira-Gupta-Child-Labour-Prohibition-and-Regulation-Amendment-Act-2016-A-law-that-allows-child-labour/article56842404.ece>. Diunduh pada 9 Oktober 2023.

The Hindu. (2022b). “India has done ‘much better’ in fight against child labour, says Kailash Satyarthi”.
<https://www.thehindu.com/news/national/india-has-done-much-better-in-fight-against-child-labour-says-kailash-satyarthi/article65377657.ece>. Diunduh pada 4 Februari 2024

Walia, S. (2015). “The Modi government is sending millions of kids back into exploitative labour”.
<https://qz.com/india/396949/the-modi-government-is-sending-millions-of-kids-back-into-exploitative-labour>. Diunduh pada 11 September 2024